

**BRIEFING PAPER
(KAU,SPI,WALHI)**

KRISIS HARGA PANGAN, SPEKULASI, DAN G-20

Latar Belakang

Bencana kelaparan dan malnutrisi kembali menjadi pusat perhatian dunia. Menurut FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian-PBB) pada tahun 1996 terdapat 800 juta dari 5,67 milyar penduduk dunia yang menderita kurang pangan, diantaranya 200 juta balita menderita kurang gizi terutama energi dan protein. Revolusi hijau, revolusi putih, dan revolusi pangan lain ternyata bukan jawaban. Jumlah rakyat lapar di dunia malah meningkat, menembus angka 920 juta rakyat per 2006. bahkan tahun 2009 lalu orang kelaparan dan kurang gizi mencapai 1,02 miliar (FAO newsroom, dalam A. Ya'kub 2009)

Kelaparan sebagai indikasi penindasan terhadap hak atas pangan makin bertambah buruk. India adalah negeri dengan jumlah penderita kelaparan tertinggi di dunia, disusul oleh China. 60% dari total penderita kelaparan di seluruh dunia berada di Asia dan Pasifik, diikuti oleh negeri-negeri Sub-Sahara dan Afrika sebesar 24%, serta Amerika Latin dan Karibia 6%. Setiap tahun orang yang menderita kelaparan bertambah 5,4 juta. Juga setiap tahunnya 36 juta rakyat mati karena kelaparan dan gizi buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung (PCFS, 2007). World Food Program pun melaporkan kelompok rawan pangan meningkat sekitar 4 juta jiwa per tahun.

Krisis pangan juga melanda setidaknya 25 negara di Asia, sepertihalnya Bangladesh, Srilangka, Pakistan dan Indonesia. Pada umumnya negara tersebut adalah pengimpor pangan, yang belanja domestik untuk impor pangan tersebut melebihi 50%. Sementara, studi gugus Millenium Development Goals menyebut bahwa 80% penderita kelaparan adalah rakyat perdesaan, yang separuh di antaranya bekerja sebagai petani kecil (UNDP dalam Ikhwan, 2010), Krisis panjang di sektor pertanian telah mendorong 200.000 petani kecil di India bunuh diri sejak tahun 1996.

Rakyat miskin di Indonesia juga terus bertarung untuk bertahan hidup dengan berbagai tekanan himpitan ekonomi, kenaikan harga pangan pokok. Banyak diantaranya harus berutang, mengganti pola makan agar hemat, bahkan ada yang bunuh diri. Beberapa kasus bunuh diri di bulan Januari 2011 memang kenyataannya berlatar belakang kesulitan ekonomi. Suami istri Maksun (35) dan Rohani (33) yang bekerja sebagai buruh kebun tebu di Cirebon memilih jalan gantung diri karena sudah tidak kuat dengan desakan ekonomi yang melanda keluarganya. Suami istri yang memiliki tiga orang anak ini hanya berpenghasilan Rp 25.000 per hari, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya sehari-hari (A. Yakub, 2011). Bahkan bertepatan dengan pernyataan pemerintah melalui Menko Ekuin (Januari 2011) yang

mengungkapkan berbagai keberhasilan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, 6 orang bersaudara meninggal dunia karena keracunan setelah sarapan tiwul. Mereka terpaksa makan tiwul karena keluarga tidak mampu untuk membeli beras.

Krisis bermula ketika terjadi peningkatan harga beberapa komoditi pangan dunia secara drastis dan mengejutkan. Data-data yang dirilis UNCTAD dan FAO menyebutkan secara umum indeks harga pangan dunia antara tahun 2002-2008 meningkat sebesar 84%. Kenaikan drastis terjadi pada komoditi gandum sebesar 314% dan kedelai sebesar 87% (Somo, 2010), Harga beras melonjak sebesar 74% dan jagung sebesar 31% (FAO, 2008). Pangan yang telah lama menjadi komoditi dunia menjadi makin tak terjangkau oleh daya beli negara miskin.

Padahal di saat yang bersamaan produksi pangan dunia mengalami peningkatan. Produksi gandum dunia yang harganya naik pada awal 2008 ini ternyata mengalami peningkatan yang lebih besar lagi yaitu hingga 9,34 juta ton antara tahun 2006 dan 2007. Sementara produksi gula dunia juga meningkat sebesar 4,44 juta ton sepanjang tahun 2007 lalu. Suatu angka yang cukup mencengangkan ditunjukkan dalam produksi jagung dunia pada tahun 2007/2008 lalu yang mencapai rekor produksi 792,3 juta ton atau meningkat 80,1 juta ton dari tahun 2006/2007. Hanya kedelai yang mengalami penurunan produksi sebesar 17 persen, itu pun karena ada penyusutan lahan di Amerika Serikat sebesar 15 persen untuk proyek agrofuel (A. Ya'kub, 2008).

Lonjakan tajam harga pangan dunia pun mengancam Indonesia sebagai salah satu negara *net importer* pangan. Sampai saat ini impor pangan Indonesia mencapai Rp. 110 triliun/tahun, yang terdiri dari kedelai sebesar 2,2 juta ton/tahun atau sekitar 70-80% total kebutuhan kedelai nasional. Di samping itu Indonesia masih harus mengimpor gandum sebesar 4,5- 5 juta ton/tahun, yang meliputi hampir 100% kebutuhan gandum nasional, jagung sebesar 1 juta ton/tahun, dan beras sekitar 1 juta ton pada tahun 2010. Pada pertengahan 2007 rakyat Indonesia dipusingkan dengan melonjaknya harga minyak goreng yang kini telah mencapai Rp 15.000 per kg atau naik 43 persen dibandingkan harga periode yang sama tahun sebelumnya. Harga kedelai meningkat lebih dari 100 persen pada awal tahun 2008 hingga kisaran Rp. 7.800 sampai 8000 per kg yang merupakan harga tertinggi sejak 24 tahun terakhir. Menyusul kenaikan harga bahan pangan lainnya seperti beras, jagung, gula, susu hingga daging. (A. Ya'kub, 2008)

Sebagai salah satu anggota G-20, Indonesia telah menyuarakan penghentian spekulasi perdagangan komoditi berjangka pangan, yang dianggap sebagai penyebab krisis pangan. Tentu perlu dikaji lebih dalam kaitan antara krisis pangan, spekulasi, dan berbagai sebab struktural pertanian yang lebih mendasar, sehingga memungkinkan dunia masih terpuruk dalam bencana kelaparan. Setelah itu perlu dicari solusi-solusi substantif, radikal, dan permanen untuk mencegah krisis pangan dan berbagai krisis global lainnya berulang.

Spekulasi Pangan

Berbagai krisis yang melanda dunia baik di sektor keuangan, perbankan dan pangan telah lama ditengarai sebagai akibat dari kegiatan spekulasi para pemilik modal. Dalam konteks pangan, spekulasi ini bukanlah hal baru karena sudah dilakukan setidaknya sejak awal abad 20 di Amerika Serikat (AS). Para spekulator keuangan memperdagangkan kontrak berjangka di bursa tanpa terkait langsung dengan fisik produksi, pemrosesan, dan pendistribusian. Akibatnya harga komoditi pangan dapat melonjak secara tajam dan tiba-tiba, sehingga berimbas pada instabilitas pasar modal dan perekonomian keseluruhan.

Guna membatasi maraknya spekulasi, Pemerintah AS mengeluarkan beberapa regulasi, di antaranya *the Securities Act* tahun 1933, *the Securities Exchange Act* tahun 1934, dan *the Commodity Exchange Act* tahun 1936. Pada saat yang sama kontrak-kontrak baru yang lebih kompleks diatur berdasarkan harga pangan (Somo, 2010). Kini menilik situasi serupa 75 tahun yang lalu tersebut maka krisis pangan saat ini kiranya hanyalah sejarah yang kembali berulang. Sama bermulanya dari AS yang saat ini menjadi negara terkemuka dalam G-20.

Pandangan peranan spekulasi dalam krisis pangan dewasa ini disampaikan oleh berbagai kalangan. Pandangan lembaga multilateral di antaranya berasal dari FAO, UNCTAD, UN Official Environment Program, UN *Special Rapporteur on the Right to Food*, dan Socialist Member of Europe Parliament. Bahkan Barnier, Internal Market Affair Uni Eropa, menyebut bahwa spekulasi komoditi pangan sebagai sebuah skandal di tengah jutaan rakyat dunia yang menderita kelaparan. Gary Gensler, Regulator Komoditi Pemerintah AS pun menyatakan spekulasi telah melukai baik petani maupun konsumen.

Pernyataan serupa dari kalangan pemerintahan disampaikan Presiden Prancis, yang juga pimpinan G-20, serta Menteri Keuangan India dan Indonesia sebagai representasi negara berkembang di G-20. Spekulasi sebagai akibat lemahnya pengaturan pasar dikemukakan pula oleh kalangan ekonom seperti halnya Stiglitz dan Roubini. Sementara dari kalangan pelaku pasar muncul pandangan dari Presiden Merrill Lynch, Gregory Flemming, yang menyebut kenaikan harga pangan adalah akibat spekulasi seperti yang terjadi pada *bubble dot.com* di AS pada akhir tahun 90-an.

Sikap lebih keras disampaikan kalangan gerakan sosial di berbagai belahan dunia. Tak kurang dari 118 gerakan sosial dari berbagai negara merilis pernyataan bersama perihal penghentian spekulasi pangan. Di Indonesia pandangan ini disuarakan oleh Petisi Kedaulatan Rakyat Indonesia (PKRI), dengan pendekatan yang lebih struktural. Sementara kajian lebih analitik dibuat oleh SOMO, lembaga riset di Belanda yang menyusun laporan bertajuk *Financing Food: Financialization and Financial Actors in Agricultural Commodity Market*.

Para pihak tersebut umumnya menyebut pelaku industri jasa keuangan yang memperdagangkan derivatif komoditi, baik investor institusional, *hedge funds*, dan bank investasi, utamanya *lobbyist* di Wall Street, sebagai spekulator pangan. Kelembagaan utama pendukung kegiatan mereka di antaranya adalah *Chicago Merchantile Exchange (CME)*, yang

menghasilkan transaksi kontrak berjangka pangan sebanyak 1,1 juta kontrak per hari. Sementara laporan SOMO menyebutkan dealer derivatif komoditi terbesar di Wall Street adalah Goldman Sach, JP Morgan, dan Bank of Amerika, yang sekarang juga menguasai Merrill Lynch, Citigroup, dan Morgan Stanley.

Pangsa pasar mereka meliputi 96% dari total perdagangan derivatif *over the counter* (OTC) sebesar \$ 293 trilyun yang dilakukan oleh 25 perbankan di AS pada tahun 2009. Bank terbesar di AS menguasai \$ 28 trilyun perdagangan derivatif. Sementara itu, pedagang derivatif komoditi utama di Eropa adalah Credit Sues, Deuthce Bank, HSBC, dan Robobank. Perdagangan derivatif komoditi ini juga melibatkan perusahaan agribisnis multinasional, seperti halnya Cargill, Bunge, dan ADM.

UNCTAD menunjukkan indikasi kegiatan spekulasi derivatif komoditi tersebut di antaranya dengan peningkatan drastis *Commodity Index Fund* dari hanya sebesar \$ 13 milyar pada tahun 2003 menjadi sebesar \$ 317 milyar pada tahun 2008. Sementara data Uni Eropa juga menunjukkan lonjakan tajam indeks komoditi dari sebesar \$ 15 milyar (2002) menjadi sebesar \$ 300 milyar (2008). Sampai dengan tahun 2008 total nilai derivatif komoditi OTC pun telah mencapai \$ 517, 8 trilyun.

World Development Movement (WDM) menyebutkan jumlah kontrak derivatif komoditi melonjak 500% antara tahun 2002-2008. Spekulasi mendominasi kontrak komoditi dalam jangka panjang, di antaranya pada komoditi jagung sebesar 65%, kedelai 68%, dan gandum 80%. Sementara itu, GRAIN, sebuah lembaga riset independen menengarai lonjakan laba perusahaan investasi rata-rata antara 67% sampai dengan 86% sebagai indikasi spekulasi. Lonjakan laba serupa dinikmati oleh perusahaan distributor multinasional seperti halnya Tesco, Carrefour, dan Walmart. Laba Cargill melonjak sebesar 60%, sedangkan laba Monsanto meningkat sebesar 45%.

Maraknya spekulasi terjadi paska berakhirnya *booming* spekulasi pasar perumahan dan keuangan di AS yang menyebabkan krisis finansial global tahun 2008. Perbankan investasi yang tidak ingin kehilangan kesempatan meraup laba maksimal, mengalihkan modalnya ke pasar berjangka komoditi. Negara yang memiliki keterkaitan erat dengan sistem keuangan dan perdagangan berjangka komoditi global dengan begitu akan terkena imbas lebih berat di banding negara yang relatif steril dari keterkaitan dengan pelaku pasar keuangan internasional.

Peran dan Intervensi G-20

Isu yang kemudian dimunculkan kembali untuk meredakan maraknya spekulasi komoditi pangan adalah perlunya re-regulasi. Seperti halnya pasca gejolak Wall Street tahun 30-an maka pemerintah Obama dan kongres AS saat ini mengeluarkan regulasi *the Dodd-Frank Act* tahun 2010 untuk membatasi perdagangan kontrak berjangka. Pengetatan aturan disertai peningkatan transparansi pasar derivatif komoditi tersebut diyakini akan menutup celah bagi para spekulasi pemburu laba, sehingga bencana kelaparan dunia dapat diminimalkan.

Pada tingkatan internasional, G-20 yang dimotori Perancis dan AS pasca pertemuan di Pitsburg bulan September 2009 mendorong pembatasan transaksi kontrak berjangka komoditi. Pertemuan Pitsburg tersebut memunculkan dua komitmen pokok. *Pertama*, semua kontrak derivatif OTC bestandar harus diperdagangkan dalam platform tertentu yang disesuaikan, diterangkan, dan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2012. *Kedua*, negara-negara G-20 sepakat untuk meningkatkan pengaturan, fungsi, dan transparansi pasar keuangan dan komoditi mereka. Kedua komitmen ini bermuara pada pembatasan posisi (*position limit*) transaksi perdagangan kontrak berjangka yang rentan dipermainkan oleh para spekulan.

Bentuk intervensi melalui kesepakatan dalam G-20 tersebut sesungguhnya bukan hal baru menilik fakta historis di atas, juga melihat yang sudah dilakukan negara anggota sepertihalnya India. Berkaca pada fakta historis krisis di negara maju, maka India telah menerapkan kerangka regulasi perdagangan komoditi yang lebih ketat jauh sebelum tanda-tanda krisis keuangan terjadi. Regulasi tersebut didukung oleh intervensi negara yang sangat kuat di sektor keuangan. Regulasi ini didukung pula oleh keberadaan *Abhijit Sen Commite* (2007) untuk meminimalisasi dampak perdagangan berjangka.

Sektor keuangan India relatif tidak tergantung pada aliran keuangan global, sehingga strukturnya menjadi lebih ramping, tidak terlalu kompleks, dan diatur secara ketat dalam hal pengenaan laba dan imbal jasa lainnya. Minimnya perbedaan (kesenjangan) gaji dan imbal hasil antara sektor keuangan dan sektor riil, serta tidak terlalu tingginya ekspektasi laba mendorong perkembangan industri dan perekonomian India pada umumnya.

Perubahan dan pengetatan regulasi yang didorong G-20 tersebut sepintas mencerminkan perhatian negara-negara maju sepertihalnya AS, Inggris, dan Prancis tentang perlunya koreksi terhadap pasar keuangan global yang cenderung bebas dan terbuka. Namun pemusatan solusi pada pengaturan (regulasi) perilaku aktor pemain kiranya tidak akan menyelesaikan persoalan mendasarnya berupa krisis pangan dan bencana kelaparan. Hal ini karena spekulasi pangan bukan hanya akibat dari lemahnya regulasi, melainkan wujud dari kelemahan sistem dan struktur keuangan dan pertanian global itu sendiri.

Spekulasi adalah penyebab krisis harga pangan, bukan sebab akar terjadinya krisis pangan. Sehingga regulasi spekulasi tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola pangan hanya akan menyebabkan krisis yang terus berulang. Krisis pangan yang melanda sebagian negara Afrika dan Asia dewasa ini terjadi oleh sebab-sebab struktural (sistemik), yang utamanya berkaitan dengan sistem atau tata produksi pertanian global. Seperti pandangan Gimenez-Peabody (2008) yang menyatakan bahwa krisis pangan terjadi karena monopolisasi perusahaan terhadap sistem pangan dunia, sebagai akibat dari berlakunya kesepakatan perdagangan yang tidak adil, konsentrasi kepemilikan, dan dominasi Bank Dunia, IMF, dan WTO di kancah internasional.

Neokolonialisme Pangan

Krisis pangan berkaitan erat dengan ketergantungan negara berkembang terhadap pangan impor utamanya dari perusahaan multinasional di negara maju. Ketergantungan tersebut sengaja diciptakan dengan sesegera mungkin membuka pasar negara berkembang, sebelum mereka sempat membangun industri pertanian dalam negeri. Globalisasi neoliberal sebagai imperasi Konsensus Washington 1987 yang dipaksakan lembaga-lembaga keuangan (Bank Dunia dan IMF) dan perdagangan internasional (WTO) telah merenggut kemampuan negara-negara miskin untuk menyediakan pangan bagi rakyatnya sendiri. Pada akhirnya negara-negara miskin dan berkembang terperangkap dalam jerat kapitalisme global.

Akibat Letter of Intent (LoI) dengan IMF, pemerintah membuat kebijakan yang tidak menguntungkan petani antara lain penghapusan dan atau pengurangan subsidi, penurunan tarif impor komoditi pangan yang merupakan bahan pokok seperti beras, terigu, gula dan pengurangan peran pemerintah dalam perdagangan dengan BULOG telah diprivatisasi, tak lagi mampu mengontrol stok beras dan menentukan harga, karena hampir 93% dikontrol oleh korporasi swasta.

Model pertanian yang didorong oleh lembaga-lembaga tersebut adalah pertanian monokultur yang berorientasi ekspor sepertihalnya kelapa sawit yang kian masif dibuka sepertihalnya di Indonesia. Sementara pertanian pangan berorientasi dalam negeri masih dibuat tergantung dalam asupan faktor produksi dari perusahaan multinasional, sebagai warisan periode kelim revolusi hijau di tahun 1970-an. Luasan areal pertanian pangan mengalami penyempitan drastis akibat konversi ke perkebunan berorientasi ekspor tersebut. Pada saat yang sama terjadi proletarisasi petani kecil di perdesaan yang di Indonesia rata-rata kepemilikan lahannya terus menyusut tinggal kurang dari 0,3 ha.

Ketergantungan pangan seiring dengan ketergantungan finansial (utang luar negeri dan investasi asing), IPTEK, dan pasar telah mengakibatkan terus tersedotnya sumber daya negara miskin-berkembang ke perusahaan multinasional di negara-negara maju. Relasi sub-ordinan inilah yang kiranya tepat disebut sebagai neokolonialisme pangan. Makin mengecilkan kemampuan negara, termasuk anggota-anggota G-20 untuk mengantisipasi semua bentuk eskalasi kerakusan dalam meraup laba maksimal oleh segelintir elit pelaku pasar pangan global.

Neokolonialisme pangan, sebagai bagian dari neokolonialisme ekonomi secara keseluruhan memiliki kaitan erat dengan sebab-sebab fundamental krisis pangan, di antaranya kerusakan lingkungan, konversi dan penurunan kualitas lahan, pemanasan global (perubahan iklim), perubahan pola konsumsi. Neokolonialisme dewasa ini memiliki implikasi yang lebih luas seperti ungkapan Vandana Shiva di mana kolonisasi lama hanya menguasai tanah, sedangkan kolonisasi baru merampas seluruh kehidupan (Tetanel, 2009). Konversi pangan sebagai bahan bakar (agrofuel) kiranya juga menjadi ancaman baru di masa depan.

Adapun penentangan terhadap oligarki kekuasaan ekonomi global akan berubah menjadi perang dagang ataupun perang pangan. Perang yang mencerminkan pertentangan kepentingan antara pedagang pangan multinasional dan pemerintah atau pihak-pihak di dalam

negeri yang menginginkan kemandirian pangan. Indonesia dan India sebagai representasi negara berkembang di Asia akan selalu menghadapi situasi dilematis ini, akankah melayani pelaku pasar global atau petani kecil di perdesaannya sendiri.

Sejauh regulasi ekonomi yang dibuat di Indonesia maka kiranya pilihan pertama nampak lebih diutamakan. Baik lahan, sumber daya air, listrik, migas, mineral-batubara, sumber daya manusia, dan berbagai alat produksi penopang industri pertanian lain telah dileluasakan untuk dikuasai perusahaan multinasional. Hubungan paradoksal antara negara maju, MNC, dan negara berkembang inilah yang kiranya tetap saja melemahkan makna kesepakatan-kesepakatan internasional sepertihalnya dalam pertemuan G-20 paska krisis finansial global.

Demikian krisis pangan sebagai akibat neokolonialisme pangan memerlukan solusi perubahan radikal dan struktural terhadap sistem dan kebijakan pertanian dan keuangan global. Tanpa itu dunia hanya akan menciptakan spiral bagi terus berulangnya krisis global. Sistem pertanian dunia semestinya dikembalikan pada fungsi esensialnya untuk mencukupi kebutuhan pangan seluruh warga dunia tanpa terkecuali. Era komodifikasi dan finansialisasi pangan di bawah kendali korporasi sudah saatnya diakhiri karena ialah penyebab hakiki dari berulangnya krisis pangan dan bencana kelaparan global.

Solusi Kedaulatan Pangan

Semestinya negara-negara berkembang menyadari bahwa krisis pangan yang terjadi dewasa ini merupakan refleksi kegagalan kapitalisme global. Krisis pangan kian membuka kedok dan menampakkan wajah sesungguhnya pasar bebas di berbagai sektor ekonomi termasuk halnya pertanian. Pasar bebas pertanian alih-alih membantu efisiensi alokasi sumber daya pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, justru telah makin menjerumuskan negara miskin ke dalam bencana kelaparan, jebakan utang, ketergantungan, dan kemerosotan perikehidupan sosial.

Oleh karena itu, solusi yang perlu didesakkan melalui forum-forum G-20 adalah bagaimana mengembalikan kedaulatan dan kontrol pangan ke tangan seluruh rakyat di negara berkembang. Indonesia dan India hendaknya menggunakan forum G-20 untuk menyuarakan perlunya kedaulatan pangan (*food sovereignty*) seperti yang diperjuangkan oleh berbagai gerakan petani secara internasional. Upaya mewujudkan kedaulatan pangan memerlukan perombakan tatanan (sistem) pertanian global, dalam lingkup tata produksi, tata alokasi, dan tata niaga pangan.

Pertama, perombakan tata produksi pertanian global, dari yang saat ini masih bercorak oligopolis, neokolonialis, dan ketergantungan, menjadi demokratis penuh kedaulatan. Solusi ini menuntut demokratisasi alat-alat produksi pertanian di negara berkembang sepertihalnya tanah, benih, pupuk, mesin, dan pembasmi hama. Pembaruan agraria untuk meningkatkan pemerataan produksi mendesak dilakukan, dengan upaya sistematis untuk menghalau dominasi korporasi dan lembaga keuangan internasional di sektor pertanian negara berkembang.

Solusi ini memerlukan penguatan kelembagaan serikat-serikat petani sebagai pilar bagi pengembangan pertanian terpadu, organik, dan berbasis kekeluargaan. Pertanian rakyat diusahakan secara multikultur dengan berorientasi keswadayaan (*self-sufficiency*) untuk mengikis habis ketergantungan kepada produk impor MNC dan negara maju. Upaya ini sekaligus untuk mempersempit ruang gerak korporasi global dalam pengurusan sumber alam, penguasaan pasar, dan intervensi kebijakan pertanian pangan di negara berkembang.

Kedua, perombakan tata alokasi pertanian global, dari yang saat ini bertumpu mekanisme pasar dan berorientasi komodifikasi, menjadi pertanian untuk pemenuhan kebutuhan dan hak pangan bagi semua orang. Solusi ini menuntut pemenuhan pangan sebagai hak dasar setiap orang tanpa kecuali, yang wajib disediakan oleh negara. Produksi pangan diorientasikan untuk konsumsi dalam negeri dan negara lain yang kekurangan, dengan jaminan bahwa semua warga negara dan dunia terbebas dari kelaparan, kekurangan, dan ketergantungan pangan impor.

Solusi ini menuntut politik anggaran pemerintah untuk mampu menyediakan jaminan pangan yang memadai bagi seluruh warga negaranya. Di satu sisi ini akan menjadi wujud dukungan bagi petani domestik, selain sebagai bentuk komitmen bagi konsumen marjinal yang mengalami kerentanan pangan. Pemerintah harus berperan kuat dalam memastikan pemerataan alokasi pangan, hal yang tidak mampu dilakukan oleh pasar. Hal ini tentu mensyaratkan kontrol kuat rakyat dan negara atas hasil produksi pangan.

Ketiga, perombakan tata niaga pertanian global, dari yang saat ini bertumpu pada perdagangan bebas (*free trade*) yang dikemukakan oleh korporasi, lembaga keuangan global, dan negara maju menjadi perdagangan adil (*fair trade*) dengan menjunjung tinggi solidaritas, kebersamaan, dan kedaulatan nasional. Solusi ini menuntut kebersatuan negara berkembang didukung serikat-serikat taninya untuk menghalau dominasi oligopsonis dan spekulasi penguasa pasar global.

Negara-negara berkembang harus menyusun agenda perubahan model penentuan harga komoditi pangan. Tak sewajarnya lagi harga pangan ditentukan oleh segelintir pelaku pasar di bursa komoditi AS dan Eropa, yang terbukti sangat mudah dipermainkan para spekulasi. Melalui perombakan pada tata produksi dan alokasi, maka harga pangan global dapat ditentukan secara adil, terbuka, wajar sesuai biaya produksi, dan di bawah kendali negara produsen dan negara tujuan. Tidak perlu lagi lewat perantara pasar yang dikuasai oleh pemodal dan spekulasi pemburu rente dari transaksi internasional.

Solusi ini berimplikasi pada direbutnya kontrol perdagangan dan keuangan dari korporasi negara-negara maju melalui lembaga-lembaga multilateral seperti halnya IMF, Bank Dunia, dan WTO. Karena kekuasaan, dominasi, bahkan hegemoni perdagangan dan keuangan mereka seperti diuraikan pada bagian awal tulisan inilah yang menumbuhkan spekulasi pangan, yang berujung pada krisis pangan dan bencana kelaparan. Tanpa itu kesepakatan G-20 di Pittsburgh tahun 2009 untuk meredam maraknya spekulasi pangan melalui regulasi transaksi derivatif komoditi hanya menjadi sebuah kepedulian yang sarat kepura-puraan.

Kesimpulan

Krisis harga pangan dan bencana kelaparan dunia merupakan akibat spekulasi komoditas pangan oleh bankir dan lembaga pendanaan investasi, namun lebih mendasar lagi krisis pangan disebabkan karena ketimpangan struktural pertanian global, baik penguasaan alat produksi, corak produksi maupun skema distribusinya. Dominasi segelintir pelaku pasar komoditi pertanian di negara maju baik di wilayah produksi maupun perdagangan telah membuka celah yang sangat lebar bagi spekulasi pangan. Ketergantungan pangan yang sengaja diciptakan makin meleluasakan aksi spekulasi dalam meraup laba di tengah penderitaan bangsa-bangsa miskin di dunia. Oleh karena itu, usaha meredam maraknya spekulasi pangan seperti yang diserukan oleh pimpinan G-20 tidak akan banyak membawa perubahan tanpa disertai perombakan tatanan pertanian, perdagangan, dan keuangan global.

Neokolonialisme pangan sebagai pangkal persoalannya, sehingga negara berkembang yang tergabung dalam G-20 perlu mendorong perubahan mendasar ke arah terwujudnya kedaulatan pangan. Pangan harus dikembalikan di bawah kuasa rakyat dan negara, serta dijauhkan dari dominasi elit korporasi global. Hal ini memerlukan perombakan tatanan produksi, alokasi, dan niaga yang dapat menjamin negara berkembang untuk mampu mengatur produksi, alokasi, dan harga pangannya secara mandiri dan terbebas dari spekulasi. Tatanan yang menghubungkan antar bangsa dengan prinsip kesetaraan, solidaritas, dan kedaulatan nasional.

Tanpa pembaruan mendasar maka krisis harga pangan dan bencana kelaparan akan selalu menjadi ancaman. Pun, berbagai kesepakatan internasional termasuk yang dihasilkan dalam forum-forum pertemuan G-20 hanya akan menjadi *lips service*, yang semua tetap bermuara pada pengukuhan dominasi negara maju dan pemodal internasional.

REFERENSI

- Actionaid, How the G-20 Can Help Prevent a New Food Crisis, dalam *G20 Briefing Paper*, March 2011
- FAO-UN, 2009, *Responding to the Food Crisis: Synthesis of Medium-term Measures Proposed in Inter-agency Assessments*, FAO-WFP-EU
- Cooper, Andrew dan Bradford, The G-20 and The Post-Crisis Economic Order, dalam *CIGI G-20 Papers No 3 June, 2010*
- De Schutter, Olivier, Food Commodities Speculation and Food Price Crises, *Briefing Note-02, September 2010*

Gimenez, dan Peabody, From Food Rebellion to Food Sovereignty: Urgen Call to Fix a Broken Food System, *dalam* www.globalissues.org, August 10, 2008

Ikhwan, Muhammad, Melawan Kelaparan, artikel dimuat dalam *Harian Koran Tempo*, 16 Oktober 2010

Hari, Johan, How Goldman Sach Gambled on Starvation, *dalam* www.independent.co.uk, 2 Juli 2010

Jones, Tim , 2010, *The Great Hunger Lottery: How banking Speculation Causes Food Crisis*, World Development Movement

LaRouche PAC, *Indonesia Fights Globalized Agro-Food Speculators*, release February 18, 2011

Le Maire, Bruno, How the G-20 Can Prevent a Food Crisis, *dalam* www.foreignpolicy.com, 14 Maret 2011

Overseas Development Institute, *A Depelopment Charter for the G-20*, Maret 2009

Patnaik, Biraj, Speculation and the Economics of Hunger, *dalam* www.im4change.org, 8 Oktober 2010

Pohlmann, dkk (ed), 2010, *The G-20: A Global Economic Government in a Making?*, Freiderich Ebert Shiftung International Policy Analysis

Reliefweb Report, Africa: World Bank Warns G20 on Food Crisis, *dalam* www.reliefweb.int, April 11, 2011

Roubini, Nourel, 2011, Our G-Zero World, artikel dimuat dalam www.foreignaffairs.com

Roy, Sumit, The Food Crisis National and Global Challenges, *dalam* www.eldis.org,

Sen, Sunanda, Food Price, Specualtion, and Future's Trading, *dalam* www.indiacurrentaffairs.org

Serikat Petani Indonesia, Kedaulatan Pangan, Jalan Keluar Krisis Pangan Indonesia, *dalam* www.spi.or.id, 1 Februari 2008

Setiawan, Bonnie, 2003, *Globalisasi Pertanian; Ancaman Atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani*, The Institute for Global Justice, Jakarta

Somo Paper, 2010, *Financing Food: Financialization and Financial Actors in Agricultural Commodity Market*, Amsterdam

Stop Gambling on Food and Hunger, Call for Immediate Action on Financial Speculation on Food Commoditite, *dalam* www.weed-online.org, 6 Mei 2011

Suppan, Steven, 2010, *Multilaterizing G-20 Commitment on the Commodity Derivatives Market*, Institute for Agriculture and Trade, Minnesota

Tetane;, Yauri, 2009, *Kedaulatan Pangan dan Nasib Pertanian Indonesia*, materi presentasi (PPT)

The Global Unions "Washington Declaration", Trade Union Statement to the "G20 Crisis Summit", Nopember 2008

Tujan, Antonio (ed) , *Modul Tentang Kedaulatan Pangan*, People Coalition on Food Sovereignty, diterjemahkan oleh Subhan A Hamid, 2007

UNCTAD Policy Briefs, *Tackling the Global Food Crisis*, June 2, 2008

_____, 2009, *The Global Economic Crisis: Systemic Failures and Multilateral Remedies*, New York and Geneva

Wise, Timothy A, The True Cost of Cheap Food, *dalam Resurgence Issue 259/March-April 2010*

Ya'kub, Achmad, "Menyelamatkan Pertanian dan Menjamin Kedaulatan Pangan", Jakarta, 24 Februari 2011 dan di publikasikan di www.spi.or.id dan www.indoprogress.com pada Januari 2011

Ya'kub, Achmad, "Memperbaiki Sistem Pangan: Kedaulatan Pangan", Makalah disampaikan dalam kursus yang diadakan oleh LEAD, Jakarta 2009

Ya'kub, Achmad, "Krisis Harga Pangan", tulisan tidak dipublikasikan 2008

